

MOHAMMAD HATTA DAN PARTAI DEMOKRASI ISLAM INDONESIA: DINAMIKA PEMIKIRAN HUBUNGAN AGAMA DAN POLITIK

Muhammad Iqbal

Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara
Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20731 Sumut
Email: dr.muhammadiqbali@yahoo.com

Abstract: Muhammad Hatta and Indonesian Islamic Democratic Party: A Thought Dynamic of Relationship between Religion and Politic. Mohammad Hatta as a person who firstly proclaims RI was an initiator who had an idea of separated relationship between religion and politic. Hatta was someone who “responsible” for deleting seven words on Jakarta Charter 1945 as a spirit in integrating religion and politic. He lobbied many Islamic prominent figures to consider deleting “sacred” words on the Jakarta Charter, “*kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” (“the compulsory to obey Islamic law for the followers”) that was recommended by the nine committees. Such statement had made Hatta elder statesman who tried to separate religion from state. Otherwise, as far as he lived he used to build an Islamic in the early New Order era although it fell down. There were an impression that he changed his state of mind in relation to the religion and state. He took Islam as a basis of regulating politic and government. This was showed from Hatta’s effort in establishing Indonesian Islamic Democratic Party with other muslim public figures. Looking at his background, the idea and the effort were not his phase thought, but they were crystallization of his religious attitude that Hatta applied consistently.

Keywords: Mohammad Hatta, democratic Islamic party in Indonesia, politics

Abstrak: Muhammad Hatta dan Partai Demokrasi Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Hubungan Agama dan Politik. Mohammad Hatta, tokoh Proklamator RI, selama ini dikenal sebagai sosok yang memperlihatkan hubungan yang terpisah antara agama dan politik. Hatta adalah orang yang “paling bertanggung jawab” terhadap pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta 1945, yang menjadi ruh bagi penyatuan agama dan politik. Ia melobi tokoh-tokoh Islam untuk mempertimbangkan penghapusan kata-kata “sakral” dalam Piagam Jakarta tersebut, “*kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” yang telah disepakati oleh Panitia Sembilan. Ini menjadikan figur Hatta sebagai negarawan yang berusaha memisahkan antara agama dan kenegaraan. Akan tetapi, dalam perkembangan kehidupannya, Hatta pernah mencoba mendirikan sebuah partai Islam, meskipun gagal, pada masa-masa awal berdirinya Orde Baru. Ada kesan Hatta mengalami perubahan sikap dan pandangan dalam hubungan antara agama dan negara. Hatta mencoba melirik Islam sebagai dasar bagi pengaturan politik dan kenegaraan. Ini tampak dari gagasan dan usaha Hatta mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia bersama tokoh-tokoh Islam lainnya. Dari analisis terhadap latar belakangnya, ternyata gagasan dan usaha tersebut bukanlah sebagai pergeseran pemikiran, tapi merupakan kristalisasi dari sikap dan keyakinan keagamaan yang dianut Hatta secara konsisten.

Kata kunci: Mohammad Hatta, Partai Demokrasi Islam Indonesia, politik

Pendahuluan

Setelah pemberontakan Gerakan 30 September PKI tahun 1965 mengalami kegagalan dan diikuti dengan turunnya Soekarno dari kekuasaannya, Soeharto tampil ke permukaan memegang tampuk pemerintahan Indonesia. Era baru kepemimpinan Soeharto 1966 yang sering dinamakan oleh para pendukungnya sebagai Orde Baru (Orba) menjanjikan angin segar bagi kehidupan sosial politik bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tidak mengherankan kalau

era Orde Baru ini ditafsirkan sebagai kemenangan umat Islam.¹ Dalam masa transisi ini, umat Islam mencoba kembali mengambil bagian dalam peran politiknya, setelah pada masa Soekarno mengalami pasang surut.

Ada beberapa pendapat dan rencana serta usaha yang muncul dari kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian ada yang ingin merehabilitasi

¹ Ridwan Saidi, “Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru”, dalam M. Amien Rais, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 125.

partai Masyumi yang dipaksa membubarkan diri oleh Soekarno pada tahun 1960 dan menghendaki tokoh-tokohnya tampil kembali dalam politik. Sebagian kalangan ada yang ingin menjadikan Muhammadiyah sebagai partai politik yang menyahuti aspirasi umat Islam. Kedua pilihan ini tidak dapat disetujui. Untuk pilihan pertama, pemerintah Orba tidak mengizinkannya. Dalam sebuah kesempatan Ali Moertopo, tokoh tangan kanan Soeharto pada awal Orba, dengan kasar mengungkapkan kepada Prawoto Mangkusasmito bahwa pintu penjara masih terbuka lebar baginya kalau ia tetap bersikeras menghidupkan kembali Masyumi.² Sementara untuk pilihan kedua, kalangan intern Muhammadiyah sendiri tidak menyetujuinya dan tetap menginginkan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan dakwah.

Menurut Kuntowijoyo, pemerintah Orde Baru mempunyai sikap ambivalen terhadap umat Islam. Di satu pihak pemerintah merasa berutang budi kepada kaum Muslim, karena partisipasi mereka dalam perjuangan melawan komunis, tapi di pihak lain mereka menentang munculnya komunitas-komunitas Muslim yang kuat secara politik. Akibatnya, mereka menolak upaya untuk menghidupkan kembali partai Islam Masyumi.³

Untuk mengisi peran politik umat Islam, Mohammad Hatta, tokoh Proklamator RI dan mantan Wakil Presiden pertama, memprakarsai berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Sejak tahun 1965 Hatta bersama tokoh-tokoh Islam yang lebih muda melakukan pertemuan-pertemuan secara intensif dan mematangkan segala hal yang berkaitan dengan berdirinya partai baru umat Islam ini. Namun, akhirnya Soeharto sebagai Pejabat Presiden memberi "kata putus" tidak mengizinkan partai ini berdiri.⁴

Sebelum Soeharto memupus harapan Hatta, usahanya ini mendapat tanggapan pro dan kontra dalam masyarakat. Namun, terlepas dari sikap

tersebut, agaknya ada pertanyaan yang menarik untuk diketengahkan; Hatta yang selama masa perjuangan kemerdekaan dan kedudukannya sebagai Wakil Presiden tidak pernah berbicara atas nama Islam dan bahkan cenderung dianggap sebagai "nasionalis sekuler", ternyata pada masa awal Orde Baru berusaha mendirikan partai Islam dan berafiliasi dengan tokoh-tokoh Islam.⁵ Apakah hal ini merupakan pergeseran sikap dan pemikiran Hatta, atau sebagai reaksi kekecewaannya terhadap Soekarno. Atau adakah hal-hal lain yang memengaruhi pemikirannya? Tulisan ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Secara sistematis tulisan ini akan membahas tentang biografi Hatta, latar belakang dan persiapan pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), tanggapan terhadap rencana pendirian PDII dan sebuah tinjauan tentang sikap dan pemikiran Hatta.

Biografi Mohammad Hatta

Mohammad Hatta dilahirkan pada 12 Agustus 1902 di Bukittinggi, sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah dataran tinggi Agam. Kota ini terkenal indah dan terletak di kaki Gunung Merapi dan Singgalang. Pada masa kolonial Belanda, kota ini dikenal dengan Fort de Kock, meskipun masyarakat Agam sendiri menyebutnya dengan Bukittinggi.⁶ Ayahnya, H. Muhammad Djamil, adalah seorang saudagar. Ia meninggal dunia dalam usia muda, tiga puluh tahun, ketika Hatta masih berusia delapan bulan. Ibu Hatta, Siti Saleha, juga berasal dari keluarga yang bergerak dalam perdagangan. Setelah ayah Hatta meninggal dunia, ibunya kawin dengan Mas Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang.

² Sebagaimana diceritakan Prawoto kepada Deliar Noer. Lihat Deliar Noer, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 602.

³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 68-69.

⁴ Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, (Jakarta:

⁵ Soebadio Sastrosatomo mengungkapkan sosok Hatta sebagai pribadi yang kuat, dengan pikiran-pikiran kerakyatan, sosialisme, terpancar dalam tindakan-tindakan yang arif dan tegas terhadap keputusan yang dibuat. Itu semua didasari oleh kematangan berpikir dengan dilandasi nilai-nilai religi, yang dipahami tidak hanya secara verbal sehingga Hatta lebih menonjol sebagai Nasionalis sejati, ketimbang sebagai seorang Islami. Lihat Soebadio Sastrosatomo, "Pemikiran Politik dan Perjuangan Hatta dan Sosok Negarawan", *Makalah* disampaikan dalam Seminar Nasional In Memoriam Mohammad Hatta yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Hatta, Jakarta, 16 Maret 1995, h. 3.

⁶ Mohammad Hatta, *Memoirs Indonesian Patriot*, (Singapore:

Begitu dekatnya Hatta dengan ayah tirinya ini, menurut Noer, sehingga ia menyangka bahwa H. Ning inilah ayah kandungnya. Ia baru tahu bahwa H. Ning adalah ayah tirinya pada usia 10 tahun. Namun begitu, hal ini tidak menyebabkan hubungan Hatta dengan H. Ning merenggang.⁷

Hatta menjalani masa kanak-kanak sebagaimana biasanya anak-anak masa itu, ia sekolah, mengaji dan bermain. Sejak masa kanak-kanak ini mulai tampak sikap disiplin Hatta, baik dalam membagi waktu maupun mengatur keuangan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu karakter utama Hatta selama hidupnya.

Dalam perjalanan studi Hatta terdapat dua kecenderungan yang berbeda dari dua keluarga besar Hatta.⁸ Pihak keluarga ayahnya di Batuhampar, sesuai dengan tradisi keulamaan mereka, menginginkan Hatta menempuh sekolah berbasis agama. Mereka ingin setelah menamatkan pendidikan Sekolah Rakyat, Hatta menekuni jalur pendidikan agama. Bahkan mereka sudah mempersiapkan dana untuk Hatta belajar agama ke Makkah dan selanjutnya ke Mesir. Tetapi setelah dua tahun belajar di Bukittinggi, Hatta pindah ke sekolah Belanda ELS. Lalu pada tahun tahun 1913, ketika naik kelas 5 Hatta pindah ke ELS Padang, karena pihak keluarga ibunya menginginkan Hatta belajar bahasa Prancis yang sudah diajarkan di kelas 5 di Padang. Tahun 1917 Hatta menyelesaikan ELS dalam usia sekitar 14-15 tahun. Setelah itu ia melanjutkan studi ke MULO dan tamat pada 1919.

Meskipun akhirnya Hatta menempuh jalur pendidikan umum, sebagaimana keinginan pihak keluarga ibunya, Hatta beruntung memperoleh pendidikan agama dalam kerangka pemikiran modern melalui Syekh Muhammad Djamil Djambek (1860-1947) di Bukittinggi dan Dr. Abdullah Ahmad (1878-1933) di Padang. Kedua ulama ini adalah sosok pembaru pemikiran Islam di Minangkabau

yang memahami Islam secara progresif. Dengan Djambek, Hatta belajar bahasa Arab, tafsir, fikih dan cabang-cabang lainnya pengetahuan agama. Sementara Ahmad mengajarkan Islam ketika Hatta aktif di Jong Sumateranen Bond (JSB). Ahmad mengajarkan masalah-masalah Islam dalam kaitannya dengan sosial kemasyarakatan.⁹

Dari pendidikan agama yang ia peroleh, Hatta pada perkembangannya nanti memiliki pemikiran keagamaan yang modern dan tidak memahami Islam secara simbolistik formalistik. Hatta ingin membawa Islam ke dalam kerangka pemikiran yang modern. Lebih dari itu, Hatta kelak, meskipun tidak diartikulasikannya secara tegas berasal dari ajaran Islam, menjadi seorang pejuang penggerak yang selalu konsisten menolak segala bentuk ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan.

Dari Padang Hatta berangkat ke Jakarta melanjutkan pendidikan sekolah dagang di Prins Hendrik Handels School (PHS) dan tamat tahun 1921. Di sini Hatta tetap mengikuti perkembangan politik di Hindia Belanda dan bergabung dengan gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia aktif di organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB). Setelah tamat PHS Hatta berangkat ke Rotterdam, Belanda melanjutkan studi perguruan tingginya. Meskipun kuliah di negeri yang menjajah negerinya, nasionalisme Hatta semakin kental. Ia semakin meningkatkan aktivitas pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama kawan-kawannya yang kuliah di sana dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (Indische Vereniging). Di organisasi ini Hatta bagaikan menemukan lahan yang subur bagi penanaman benih-benih nasionalismenya yang ia bawa dari Indonesia. Di sini pula ia melihat lebih luas bagaimana keadaan tanah airnya yang kaya raya tapi rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dijajah oleh Belanda. Perhimpunan Indonesia mengancam penjajahan Belanda atas Indonesia. Hatta terkenal masa itu ketika ia

⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 17-18.

⁸ Dalam tradisi masyarakat Minangkabau yang matrilineal, peran keluarga besar sangat besar. Apalagi Hatta adalah seorang yatim, yang menjadi tanggung jawab *mamaknya* untuk mengasuh dan mendidiknya. Karenanya, adalah wajar dalam keluarga besar dari pihak ayah dan ibunya merasa tanggung jawab pendidikan Hatta berada di tangan mereka. Namun begitu, di antara mereka tetap diadakan musyawarah

⁹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 18. Hatta mengakui bahwa tokoh di atas adalah dua di antara tiga ulama pendukung gerakan modern Islam di Sumatera Barat. Seorang lagi adalah Haji Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka). Mereka bertiga sangat dalam terpengaruh pada gagasan-gagasan modern Muhammad Abduh di Mesir. Mereka sangat perhatian untuk membawa Islam sejalan dengan perkembangan dunia modern. (lihat Hatta, *Mengenal Islam dan Politik Islam*).

menyampaikan pembelaannya di Pengadilan Belanda yang berjudul Indonesia Merdeka.

Ketika pulang ke Indonesia Hatta semakin meningkatkan aktivitasnya dalam kegiatan politik pergerakan. Ia sering keluar masuk penjara akibat aktivitasnya tersebut. Bahkan Hatta pernah mengalami pengasingan di Boven Digul, Irian Jaya (Papua sekarang), sebuah tempat pembuangan bagi tokoh-tokoh pergerakan yang sangat berbahaya bagi Belanda. Pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Hatta merupakan tokoh pergerakan yang menonjol. Ia bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan keesokan harinya diangkat sebagai Wakil Presiden RI pertama.

Ada satu peran Hatta yang sangat menonjol ketika perumusan dasar negara. Hatta yang termasuk anggota Panitia Kecil (Panitia Sembilan) yang akan merumuskan dasar bagi negara Indonesia yang akan merdeka membujuk para tokoh Islam yang mengusulkan Piagam Jakarta yang sila pertamanya berbunyi "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" agar diubah. Ia mengakui mendapat informasi dari seorang tentara Jepang yang mengatakan bahwa sebagian masyarakat Indonesia di bagian timur menolak bergabung dalam Indonesia, apabila rumusan Piagam Jakarta tersebut dipertahankan. Akhirnya lobi Hatta berhasil, dan rumusan sila pertama berubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Inisiatif Hatta ini semakin mengokohkan dirinya sebagai tokoh yang memisahkan agama dan negara.

Hatta menjadi salah satu tokoh paling penting pada masa-masa awal kemerdekaan. Ia bersama Soekarno merupakan Dwitunggal yang menjadi simbol dua gaya kepemimpinan Indonesia; gaya Jawa dan Minang. Soekarno lebih bergaya simbolistik, paternalistik dan cenderung feodalistik serta sangat menikmati slogan-slogan, sementara Hatta seorang pemikir serius, administrator, egaliter dan berusaha mengisi kemerdekaan dengan karya dan gagasan. Soekarno seorang yang mampu membakar emosi massa dengan gaya oratornya, sementara Hatta memberi pencerdasan massa dengan konsep-konsep dan tulisannya. Betapa pun, perjalanan Dwitunggal

tidak dapat dipertahankan. Karena perbedaan prinsip yang tidak dapat dipertemukan lagi antara kedua tokoh Proklamator RI ini, pada 20 Juli 1956 Hatta mengirim surat resmi pengunduran diri dari Wakil Presiden. Terhitung 1 Desember 1956 Hatta resmi berhenti dari jabatan tersebut.¹⁰

Meskipun tidak memiliki jabatan resmi lagi di pemerintahan, Hatta tetap berusaha menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk bangsa Indonesia. Penyimpangan-penyimpangan kekuasaan yang dilakukan Soekarno selalu dikritisinya, baik melalui tulisan maupun pertemuan kedua tokoh ini. Namun Hatta tetap mengalami kekecewaan, karena apa yang ia nasihatkan kepada Soekarno tidak pernah didengar dan diikutinya. Presiden Soekarno sudah jauh terlena dengan kekuasaannya, hingga akhirnya ia sendiri jatuh setelah gagalnya pemberontakan G. 30 S/ PKI 1965.

Naiknya Soeharto dan Orde Baru ke tampuk kekuasaan memberi sedikit harapan bagi Hatta untuk melihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya. Namun demikian, kekecewaan demi kekecewaan terus mengiringi perjalanan hidup Hatta. Cita-cita Proklamasi yang ia perjuangkan ternyata masih jauh dari kenyataan. Ia sendiri mengalami kehidupan yang pahit sebagai bekas Wakil Presiden, karena tidak memperoleh tunjangan pensiun yang wajar dan beban kehidupan yang semakin berat yang ditanggungnya sebagai warga negara biasa.

Tepat 14 Maret 1980, Hatta, tokoh bersahaja yang menghabiskan seluruh hidupnya bagi bangsa Indonesia yang dicintainya, menghadap Ilahi memenuhi janjinya.

Latar Belakang dan Persiapan Pendirian Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII)

Demokrasi Terpimpin yang diciptakan Soekarno ternyata hanya mampu bertahan selama enam tahun lebih dua bulan, yaitu sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga kegagalan pemberontakan G.30 S/PKI 1965. Namun

¹⁰ Tentang perkembangan politik yang terjadi, yang melatarbelakangi pengunduran diri Hatta, dapat dilihat pada R. N. M. A. Soekarno, *Hatta dan Soekarno*, 2014.

masa yang singkat ini memperlihatkan kepada kita suatu situasi politik yang kacau. Dalam demokrasi ala Soekarno ini, untuk pertama kali ia menerapkan ide penyatuan antara nasionalis, agama dan komunis ke dalam Nasakom, yang sejak pra-kemerdekaan juga telah terlibat dalam perdebatan filosofis tentang ideologi negara.

Dalam demokrasi ini juga terjadi kristalisasi sikap partai politik Islam.¹¹ Hanya ada dua alternatif: mendapat atau tidak mendapat sama sekali. Bagi partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), ikut dalam arus Nasakom merupakan pilihan yang tepat. Sementara Masyumi memilih sikap oposisi terhadap Nasakom.¹² Keduanya sama-sama mencari dalil agama untuk membenarkan sikap masing-masing, meskipun akhirnya mereka terpental dari pentas politik nasional. Masyumi terpental lebih dahulu karena dianggap kontrarevolusi dan dipaksa membubarkan diri oleh Soekarno pada 1960. Sementara NU dan partai-partai Islam pendukung Soekarno turun panggung politik seiring dengan jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai penguasa pada tahun 1966.

Dalam situasi kacau era Soekarno dan era baru kepemimpinan Soeharto, tentu saja tidak dapat mengabaikan keberadaan Mohammad Hatta. Meskipun sejak tahun 1957 ia meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden, Hatta sama sekali tidak pernah diam melihat perkembangan politik yang terjadi di Indonesia. Ia juga merupakan tokoh yang gigih menentang konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno dan mengecamnya sebagai "nama lain dari bentuk kediktatoran."¹³ Namun,

berbeda dengan Masyumi yang memilih oposisi, Hatta cenderung bersikap tenang, namun tetap kritis dalam menolak gagasan tersebut. Hatta lebih banyak melancarkan kritiknya lewat tulisan. Hatta bukanlah tipe orator yang mampu membakar semangat massa dengan jargon-jargonnya, seperti halnya Soekarno. Bahkan Hatta mengandalkan kedekatan hubungan pribadinya dengan Soekarno untuk mengecam konsepsi Demokrasi Terpimpin dan Nasakom yang digulirkan Soekarno. Hatta mengungkapkan, "sejak dua-tiga tahun yang akhir ini kelihatan benar tindakan-tindakan Pemerintah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan Konstituante yang dipilih oleh rakyat, sebelum pekerjaannya membuat Undang-Undang Dasar baru selesai."¹⁴ Hatta menganggap tindakan-tindakan Soekarno bertentangan dengan Konstitusi dan merupakan suatu kudeta, namun sayangnya semua ini dibenarkan oleh partai-partai dan suara terbanyak di DPR.¹⁵

Dalam satu kritiknya ia menyatakan bahwa usia Demokrasi Terpimpin tidak lebih lama dari usia Soekarno sendiri. "Diktator yang bergantung kepada kewibawaan orang-seorang tidak lama umurnya. Sebab itu pula sistem yang dilahirkan Soekarno itu tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan roboh dengan sendirinya seperti satu rumah dari kartu."¹⁶ Ternyata perhitungan

¹¹ Ahmad Syafii Maarif membagi periode Demokrasi Terpimpin ala Soekarno kepada dua fase; yaitu fase kristalisasi yang berlangsung hingga Desember 1960 dan fase kolaborasi yang terjadi hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno, yang ditandai dengan kerja sama antara pendukung Nasakom. Lihat Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988).

¹² Untuk mengetahui prinsip dan argumentasi masing-masing partai Islam dan percaturan politik pada masa Demokrasi Terpimpin, lihat Ahmad Syafii Maarif, *ibid.*; lihat juga kajian Deliar Noer tentang hal ini dalam *Partai Islam di Pentas Nasional*, (Jakarta: Grafiti, 1987), terutama pada halaman 349-424.

¹³ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi*

¹⁴ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 109.

¹⁵ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 110.

¹⁶ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 117. Meskipun sudah patah arang dengan Soekarno dan kecamaanya terhadap Soekarno begitu tajam, Hatta masih tetap menjaga hubungan pribadi dengan Soekarno. Dua tahun setelah Hatta meletakkan jabatan sebagai wakil presiden, Soekarno masih sempat mengunjungi Hatta di rumahnya. Terlihat keakraban kedua peletak dasar Indonesia modern ini. Dalam suasana akrab tersebut, ketika akan makan malam, Hatta juga masih sempat "menyerang" keras kebijakan politik Soekarno. Namun Soekarno tidak tersinggung oleh kritikan Hatta. Kritik dan nasihat tersebut disampaikan kepada Soekarno sebagai seorang sahabat. Sebaliknya, ketika karangan Hatta *Demokrasi Kita* pertama kali dibukukan, Soekarno melarang peredarannya. Semua buku yang sudah telanjur beredar, ditarik kembali dari pasaran. Melihat keadaan demikian, Hatta hanya berkomentar pendek, "Ya sudah, mau diapakan lagi." Namun demikian, Hatta tidak kunjung berhenti mengirim surat berupa nasihat kepada Soekarno untuk kembali ke cita-cita Proklamasi Indonesia semula. Dalam menyampaikan nasihat dan kritiknya Hatta menggunakan bahasa yang halus dan tidak

Hatta tepat. Soekarno jatuh bersama kegagalan pemberontakan G.30 S PKI/1965. Eksperimen berbahaya Soekarno menyatukan agama, nasionalis dan komunisme gagal total!

Berkaca dari kegagalan politik umat Islam pada era Soekarno dan upaya untuk mengembalikan peran politik umat Islam, Hatta memprakarsai berdirinya Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Bersama tokoh-tokoh Islam yang pernah berkecimpung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pelajar Islam Indonesia (PII), Hatta membuat rancangan anggaran dasar dan persiapan berdirinya partai ini. Di antara mereka yang ikut adalah Soelastomo, Muhammad Daud Ali dan Ismail Hasan Metareum.¹⁷

Hatta lebih tertarik mengajak tokoh-tokoh muda di atas yang relatif tidak terpengaruh oleh atmosfer politik era Soekarno. Sebelumnya, sejak tahun 1958 sampai terutama tahun 1963, para pemuda dan pelajar Islam yang kebanyakan dari kedua organisasi Islam ini merasa kecewa terhadap situasi negara dan roda pemerintahan. Mereka sering mengadu kepada Hatta dan mencemaskan perkembangan pemimpin partai Islam yang larut bersama arus Nasakom Soekarno.¹⁸

Di samping itu, Hatta sendiri kelihatannya tidak suka dengan cara-cara beberapa tokoh Masyumi yang pernah ikut dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

(PRRI)¹⁹ dan keterlibatan organisasi Islam dalam arus politik era Soekarno. Dalam sebuah pidatonya, Hatta menyatakan bahwa Masyumi yang pernah menjadi simbol kesatuan dan kekuatan politik umat Islam, yang di dalamnya bersatu Muhammadiyah, NU, PSII, Persis dan lain-lain, ternyata menghasilkan perpecahan karena perbedaan pendirian dan pandangan hidup masing-masing.²⁰

Secara intensif persiapan dilakukan sejak tahun 1965. Pertemuan-pertemuan diadakan di rumah Hatta sendiri dan di gedung Universitas Islam Djakarta yang saat itu dipimpin oleh Hazairin. Dari pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Dalam Anggaran Dasarnya disebutkan bahwa partai ini berjiwa Islam, bersifat Nasional, berjuang atas dasar Pancasila. Sementara tujuan PDII adalah menuju terlaksananya sosioalisme Indonesia yang tersimpul di dalamnya cita-cita Indonesia yang adil makmur, yang diridhai Allah. PDII menginginkan rakyat Indonesia merasakan tenteram jiwanya lahir batin, menikmati keadilan dan terpelihara haknya. Dengan demikian, sosialisme Indonesia menentang segala bentuk penindasan dan mengupayakan agar produksi masyarakat dilakukan atas dasar kerja sama oleh semua dan untuk semua. Sosialisme Indonesia

antara mereka dan tidak pernah melecehkan atau mengecilkan arti pribadi Soekarno.

Di sisi lain, Soekarno sendiri tetap menjalin persahabatan yang akrab dengan Hatta. Meski mendapat kritik tajam, Soekarno tetap menghargai Hatta sebagai sahabat. Bahkan ketika Hatta sakit pada tahun 1962, Soekarno menjenguknya dan memutuskan Hatta untuk berobat ke Swedia dengan uang negara. Lihat Muhammad Iqbal, *Fira'un Abad 21 Refleksi atas Persoalan-persoalan Keislaman dan Keindonesiaan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2006), h. 193-194. Sekretaris pribadi Hatta, I. Wangsa Widjaja, melihat rasa haru Soekarno ketika kepada Hatta yang dengan lemah turun dari mobilnya untuk menemui Soekarno di Istana sebelum keberangkatan. Bagaimana pun mereka berpatah arang, persahabatan antara kedua tokoh Proklamator ini tidak pernah terpisahkan oleh perbedaan politik yang berseberangan. Menurut Wangsa, Soekarno masih sempat berpesan kepadanya, "Wangsa, jaga baik-baik Bung Hatta." Lihat Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, h. 343.

¹⁷ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 633.

¹⁸ Mohammad Hatta, "Pengantar Rencana Dasar Program

¹⁹ Dalam sepucuk suratnya kepada Jenderal Gatot Soebroto, Hatta menumpahkan penyesalannya atas sikap orang-orang Sumatera Barat melakukan pemberontakan PRRI. Ia menulis, "Orang Minangkabau... biasanya sebelum berbuat apa-apa, bertanya kepada *ninik mamak*. Tetapi apa yang terjadi dengan tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Husein dan kawan-kawannya? Kata dan nasihat *mamak* sendiri tidak didengar, tetapi kata dan nasihat *mamak* Soemitro, *mamak* Sjafruddin, *mamak* Lubis, *mamak* Simbolon didengar. Inilah akibatnya. Tetapi kalau didengar dahulu kata *mamak* sendiri, tidak begitu akibatnya." Hatta juga kecewa dengan sikap Natsir yang bergabung dengan PRRI. Ketika ia menghadapi teror kelompok komunis di Jakarta, Hatta sebenarnya menyarankan kepadanya untuk lebih banyak berada di Bandung. Di sini ia bisa lebih tenang dan fokus pada pekerjaan Konstituante. Lihat Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 533.

Dari empat nama yang disebut Hatta sebagai tokoh PRRI, hanya Sjafruddin yang masih memiliki darah Minang. Itu pun dari garis ibunya yang merupakan keturunan dari penguasa Kerajaan Pagaruyung. Sementara ayahnya adalah *menak* (bangsawan) di Banten. Ini mengisyaratkan rasa kecewa yang mendalam Hatta terhadap orang Minang yang mau dipengaruhi orang lain untuk melakukan pemberontakan.

²⁰ Hatta, *Kumpulan Pidato*, (Jakarta: Yayasan Idayu Press,

yang dicitakan PDII juga menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Dalam hubungannya dengan Islam, disebutkan bahwa Islam memberi benih, sedangkan adat istiadat dan semangat gotong royong yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia merupakan lahan subur untuk menanam benih tersebut sehingga menjadi pohon yang rindang.²¹

Sementara dalam kepemimpinan partai terdapat dua pemegang kekuasaan, yaitu ketua umum partai dan pemimpin partai. Ketua umum lebih menitikberatkan tugasnya dalam soal-soal organisasi, sedangkan pemimpin partai adalah penanggung jawab politik partai dan memimpin fraksi di DPR. Dalam pasal 20 ayat 7 Anggaran Dasar dijelaskan bahwa Ketua Umum dipilih oleh Kongres yang diadakan sekali tiga tahun, sementara pemimpin partai dipilih untuk waktu yang tidak ditentukan.

Usaha Hatta di atas mendapat tanggapan dari masyarakat luas. Dari kalangan Islam, organisasi yang tergabung dalam Badan Koordinasi Amal Muslimin,²² terlihat usaha mengajak Hatta dan pemrakarsa PDII lainnya untuk bergabung bersama mereka mendirikan partai baru. Hatta tidak dapat menerima tawaran ini. Ia melihat, untuk jangka panjang hal ini tidak ada manfaatnya, karena cara-cara tokoh Amal Muslimin tidak sesuai dengan visi Hatta. Ia tidak setuju upaya Amal Muslimin yang tidak berbeda dengan Masyumi pada tahun 1945. Dalam rencana Amal Muslimin, organisasi Islam berafiliasi ke dalam satu partai dengan menampilkan tokoh organisasi masing-masing dalam partai. Dengan demikian, masing-masing tokoh akan bersaing untuk mendapatkan kedudukan puncak dalam partai. Partai dijadikan sebagai ajang untuk saling berebut pengaruh, karena kedudukan wakil-wakil organisasi asal

telah diperhitungkan sejak semula.

Sebagai orang pergerakan dan orang politik, Hatta tidak ingin mengulangi pengalaman pahit masa lalu yang dialami Masyumi. Ia melihat penyatuan ini hanya akan bermuara kepada perpecahan. Menurutnya, cita-cita untuk mencapai persatuan dan menampung seluruh umat Islam dengan organisasi masyarakatnya ke dalam satu partai baru tidaklah mudah. Partai-partai Islam yang sudah ada tidak dapat melebur dirinya dengan mudah ke dalam partai baru, karena mereka mempunyai pendirian yang memang sulit dilepaskan begitu saja. Suatu partai baru yang menyatukan organisasi-organisasi Islam yang berbeda pendirian hanya akan mengulangi sejarah Masyumi saja.²³ Ia ingin mendirikan partai yang terbebas dari kepentingan-kepentingan politik organisasi.

Dalam hal ini terlihat kejeniusan Hatta dalam membaca sejarah dan peta politik Islam Indonesia. Kekhawatirannya tentang akan berulangnya kembali pengalaman Masyumi juga menjadi kenyataan pada Amal Muslimin. Partai yang dihasilkan Amal Muslimin, yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan terakhir melebur lagi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ternyata tidak terlepas dari konflik dan perpecahan.²⁴

Dari kalangan pendukung Hatta sendiri terdapat perbedaan pandangan. Sebagian di antara mereka keberatan Pancasila, bukan Islam, dijadikan sebagai ideologi partai. Hatta mengembalikan masalah ini dengan mengatakan bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah jabaran dari prinsip tauhid dalam Islam. "Apakah Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang terkandung dalam seluruh isi Pancasila dapat dipraktekkan tanpa menurut konsepsi Islam?" Hatta menuduh sebagian Muslim yang dikatakannya sebagai orang yang tidak fleksibel. Ia mempertanyakan, "Kalau gereja Protestan dan Katolik bisa menerima

²¹ Hatta, *Kumpulan Pidato*, h. 189.

²² Badan ini dibentuk pada tanggal 16 Desember 1965 dan merupakan forum komunikasi organisasi-organisasi Islam dalam bidang sosial budaya yang mempersatukan 16 organisasi. Badan ini berupaya merehabilitasi Masyumi. Di antara organisasi yang tergabung di dalamnya adalah Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Jam'iyatul Washliyah dan HSBI. Lihat Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, h. 635 dan B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti Pustaka, 2002), h. 100.

²³ Hatta, *Kumpulan Pidato III*, h. 190.

²⁴ Polemik tentang konflik di atas direkam dalam dalam buku PPP, NU dan MI *Gejolak Wadah Politik Islam*, (Jakarta: Integrita Press, 1984). Buku ini merupakan kumpulan tulisan polemik antara K.H. Syaifuddin Zuhri, Ridwan Saidi, Mahbub Djunaedi dan Fachry Ali tentang pertikaian antara unsur-unsur organisasi politik Islam, terutama NU dan Muslimin Indonesia

Pancasila menurut ajaran agama mereka, mengapa orang Islam tidak.”²⁵

Jadi bagi Hatta, tidak ada halangan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi atau dasar partai. Tapi Hatta tetap menjadikan Islam sebagai jiwa partai. Dalam Rencana Dasar, Program dan Struktur PDII disebutkan bahwa Partai berjiwa Islam dan bersifat Nasional, berjuang atas dasar Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Peri Kemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial.²⁶

Tanggapan lain datang dari kalangan tokoh-tokoh eks partai Masyumi. Setelah Muhammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmitho, Sjafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin Harahap dibebaskan dari tahanan politik rezim Soekarno, mereka bermaksud untuk mendirikan dan menghidupkan kembali partai yang ”membubarkan diri” tersebut. Mereka mengajak tokoh-tokoh Masyumi lainnya dalam usaha ini. Salah satu di antaranya adalah Anwar Harjono yang sebelumnya ikut bergabung dengan Hatta dalam upaya pendirian PDII.²⁷ Anwar Harjono tertarik dan dengan penuh pengertian Hatta mempersilakan Anwar Harjono keluar untuk bergabung dengan tokoh-tokoh eks Masyumi tersebut.

Tokoh-tokoh eks Masyumi tersebut pada umumnya menganggap Hatta bukan ”orang kita.” Natsir pernah menyatakan bahwa Gerakan Demokrasi Islam Indonesia (GDII) yang merupakan cikal bakal PDII ”bukan kita punya”.²⁸ Dalam sebuah wawancara dengan Mavis Rose, Natsir pernah mengemukakan bahwa Hatta melihat Islam pada tingkat individu dan masyarakat, sehingga Hatta tidak memiliki empati bahwa segala sesuatunya harus mengikuti Islam. Meskipun motivasi Hatta bersifat agamis, Natsir menganggap Hatta tidak

secara sadar menggunakan gagasan-gagasan Islam dalam pertimbangan bangsa dan negara seperti yang dilakukan Masyumi.²⁹

Respons ini agaknya lebih disebabkan oleh usaha kalangan eks Masyumi untuk merehabilitasi partai Islam tersebut. Pendirian partai baru oleh Hatta kelihatannya akan menghambat usaha rehabilitasi ini. Kalau Hatta tetap berjalan dengan usahanya dalam pendirian PDII ini, besar kemungkinan rehabilitasi Masyumi akan mengalami kegagalan. Setidaknya, di mata Orde Baru, keberadaan dan kewibawaan Hatta sebagai Bapak Proklamator dan sebagai negawaran serta *track record*nya yang tidak pernah terlibat pemberontakan akan memperbesar peluang keberhasilannya. Sebaliknya, terhadap aktivis eks Masyumi pemerintah harus bersikap hati-hati. Pemerintah tampaknya mempunyai ”catatan khusus” terhadap mereka selama aktif dalam percaturan politik era Soekarno.

Paling tidak, ada tiga hal yang membuat penguasa Orde Baru lebih berhati-hati mengambil sikap pada tokoh-tokoh eks Masyumi. *Pertama*, sikap mereka yang tidak mau berdamai dengan segala bentuk otoritarianisme dan penyelewengan kekuasaan. Tokoh-tokoh eks Masyumi adalah orang-orang yang memiliki komitmen moral dan etika politik yang kokoh. Dalam batas-batas tertentu mungkin tokoh-tokoh eks Masyumi dapat dikatakan radikal. Sikap radikalisme—dalam arti ketidakbersediaan untuk kompromi dengan segala bentuk kediktatoran dan tindakan-tindakan yang tidak demokratis—para eks tokoh Masyumi merupakan kerikil penarung yang serius bagi Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya.³⁰ Hal pertama ini tentu juga dimiliki oleh Hatta yang terbiasa terdidik dalam suasana keislaman dan semangat demokrasi. Hatta juga sangat tidak setuju dengan segala bentuk kediktatoran dan penyimpangan terhadap demokrasi. Hanya saja Hatta lebih kalem dan tidak frontal menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsip yang dianutnya.

Kedua, berkaitan dengan yang pertama, sikap

²⁵ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 386.

²⁶ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 733.

²⁷ Menurut Deliar Noer, sikap Anwar Harjono ikut bergabung dengan eks tokoh-tokoh Masyumi menunjukkan bahwa loyalitasnya kepada pemimpin partainya—dalam hal ini adalah Mohammad Natsir—dan kepada partainya sangat tinggi. Begitu tokoh-tokoh panutannya keluar dari tahanan politik rezim Soekarno, ia menarik diri dari Hatta dan bergabung dengan mereka. Lihat, Deliar Noer, *Membicarakan Tokoh-tokoh Bangsa*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 47.

²⁹ Mavis Rose, *Indonesia Merdeka...*, h. 386.

³⁰ Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Mubtawana, 2004), h. 10.

radikal tokoh-tokoh eks Masyumi akan menjadi potensi yang berbahaya bagi kekuasaan Orde Baru. Kalau Masyumi diizinkan kembali berdiri, Orde Baru akan kewalahan menghadapi mereka yang kaya dengan pengalaman dan jam terbang dalam politik. *Ketiga*, Orde Baru menyadari potensi ini dengan pengalaman pemberontakan PRRI di Sumatera Barat yang sebagian penggerakannya adalah tokoh-tokoh eks Masyumi seperti Natsir dan Sjafruddin.

Hal ini kemudian menjadi kenyataan. Pemerintah Orde Baru tidak ingin pengalaman radikalisme politik Islam yang pernah ditampilkan oleh tokoh-tokoh eks Masyumi tersebut kembali terjadi. Alasan ini digunakan oleh Orde Baru untuk menolak kehadiran tokoh-tokoh eks Masyumi untuk mengisi pentas politik nasional. Pemerintah menutup pintu rapat-rapat bagi kehadiran Mohammad Roem untuk duduk dalam kepemimpinan partai baru umat Islam, Parmusi, yang lahir pada 1968. Menurut Boland, kenyataan bahwa pemimpin-pemimpin Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI di tahun 1958 kelihatannya digunakan sebagai alasan untuk melanjutkan larangan tersebut.³¹

Sementara Hatta sendiri agaknya merasa mendapat angin dan lampu hijau dari pemerintah dengan partai barunya. Adalah Mayjend. Sudirman, Komandan SESKOAD ketika itu, yang dimintainya tanggapan menyatakan simpatinya terhadap usaha pendirian PDII.³² Bahkan Hatta sendiri, ketika menyampaikan maksudnya kepada penguasa Orde Baru, Soeharto, mendapat kesan positif, walaupun sambutannya kurang begitu antusias. Soeharto tidak keberatan dan akan mempertimbangkannya. Tidak mengherankan kalau Hatta dan beberapa pemrakarsa lainnya merasa optimis akan keberhasilan mereka. Hatta bermimpi wadah partai politik yang akan menjadi pembelajaran bagi anak bangsa Indonesia yang digagasnya akan segera lahir.

Akan tetapi akhirnya Hatta harus menelan kekecewaan. Lewat surat Pejabat Presiden Soeharto tanggal 17 Mei 1967, pemerintah menolak berdirinya PDII. Ia memandang PDII tidak dapat menjamin bersatu dan tertampungnya semua kekuatan Islam di luar partai politik yang ada. Soeharto juga memandang bahwa reaksi negatif terhadap gagasan PDII merupakan gejala yang dapat mengganggu stabilitas politik Indonesia.³³ I. Wangsa Widjaja, sekretaris pribadi yang selalu menemaninya hingga akhir hayatnya, mencatat bahwa alasan penolakan tersebut antara lain adalah karena rencana pemerintah untuk memperkecil jumlah partai politik dan menggabungkan (fusi) unsur-unsur organisasi.³⁴ Walaupun kecewa, penolakan ini diterima Hatta dengan besar hati. Akhirnya ia harus mengubur cita-cita dan niatnya untuk mendirikan partai.

Menimbang Mohammad Hatta: Pergeseran atau Konsistensi

Dari prakarsa dan upaya Hatta mendirikan PDII pertanyaan yang mencuat adalah apakah ini merupakan perubahan sikap Hatta terhadap hubungan antara agama dan kekuasaan, ataukah ini merupakan pengentalan dari sikap politik keagamaan Hatta. Pertanyaan ini layak dikemukakan, karena sebagaimana di awal tulisan ini, sepanjang perjalanan Hatta sebagai negawaran dan pemikir politik, Hatta memperlihatkan hubungan Islam dan kekuasaan yang menjarak. Hatta tidak terlibat dan tidak begitu tertarik pada usaha-usaha formalisasi ajaran Islam ke dalam kehidupan politik, sebagaimana dilakukan Masyumi.

Pada saat-saat krusial ketika pembicaraan di Panitia Sembilan tentang rumusan dasar negara, Hatta termasuk tokoh yang berdiri dalam barisan yang menginginkan pemisahan hubungan formal antara agama dan negara.³⁵ Bahkan Hatta-lah

³¹ B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, h. 158.

³² Hatta memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Sudirman, karena Hatta adalah salah seorang staf pengajar di Seskoad. Menurut Wangsa Widjaja, Hatta sudah mengajar di lembaga pendidikan militer ini sejak tahun 1951, ketika masih bernama SSKAD. Di sini Hatta mengajar mata kuliah ketatanegaraan. I. Wangsa Widjaja, *Mengenang Bung Hatta*, (Jakarta: Pustaka M, 2002), h. 6-66.

³³ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 647-648.

³⁴ I. Wangsa Widjaja, *Mengenang Bung Hatta*, h. 50.

³⁵ Panitia Sembilan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri atas Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Subardjo, Abikusno Tokrosujoso, H. Agus Salim, A. Kahar Muzakkar, A. Wahid Hasjim dan A.A. Maramis. Dari kesembilan tokoh tersebut, hanya Maramis yang tidak beragama Islam. Akan tetapi, dari delapan anggota yang Muslim, empat tokoh pertama mengusung nasionalisme yang memisahkan antara

orang yang berinisiatif mengubah kesepakatan Piagam Jakarta yang dicapai melalui sidang pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam sidang ini disepakati rumusan pertama Pancasila berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Kesepakatan ini “mentah” kembali karena ada keberatan dari pihak Kristen di bagian Timur Indonesia. Mereka akan mengundurkan diri dari Negara Kesatuan RI yang akan diproklamasikan, apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dipertahankan. Hal ini mencuat dalam sidang Panitia Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945. Latuharhary yang merupakan wakil kelompok Kristen Indonesia bagian timur menyatakan keberatannya dengan perkataan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Ia menyatakan bahwa hal demikian dapat menimbulkan akibat besar bagi penganut agama minoritas dan menimbulkan masalah-masalah dengan hukum adat.

Pada 18 Agustus 1945, tujuh kata tersebut dihapuskan dari Konstitusi. Penghapusan ini berawal dari inisiatif Hatta untuk meninjau kembali rumusan tujuh kata tersebut. Ia mengatakan telah mendapat informasi dari seorang perwira angkatan laut Jepang bahwa rakyat Kristen di Indonesia bagian timur tidak akan ikut serta dalam negara Indonesia apabila tujuh kata tersebut tetap dipertahankan dalam konstitusi. Orang-orang Kristen memang menyadari bahwa rumusan tersebut tidak memengaruhi kehidupan mereka sedikit pun, tetapi mereka merasa rumusan tersebut merupakan diskriminasi. Hatta sendiri sebenarnya berpendapat bahwa itu bukanlah merupakan diskriminasi.³⁶ Di samping itu, A. A. Maramis yang merupakan wakil Kristen juga ikut menyetujuinya. Namun ia khawatir kalau-kalau apa yang dikhawatirkan perwira Jepang tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Karena

itulah, pada 18 Agustus 1945 pagi, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dimulai, Hatta mengundang tokoh-tokoh Islam yang vokal menyuarakan tujuh kata tersebut untuk meninjau kembali rumusan dalam Piagam Jakarta. Ada empat tokoh Islam yang diundang Hatta, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A. Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo dan Muhammad Hasan dari Sumatera. Dari dialog dengan Hatta ini akhirnya wakil-wakil Islam tersebut menerima saran Hatta. Maka berubahlah rumusan awal sila pertama dari Pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kasus ini semakin menegaskan sikap Hatta yang tidak setuju dengan penyatuan agama dan kekuasaan. Hatta dipandang oleh sebagian pengamat sebagai orang yang memisahkan agama dan politik.

Namun demikian, Hatta sama sekali tidak ingin menjauhkan agama dari kehidupan kemasyarakatan. Ia menginginkan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat sosialisme religius. Hatta mengungkapkan bahwa sosialisme merupakan prinsip dasar dalam Islam. Hal ini diakuinya ia peroleh dari ajaran pamannya Syekh Arsyad, pemimpin surau dan tarekat di Batuhampar. Pamannyalah yang mengajarkannya supaya secara sosial menyadari dan mengelola kebutuhan masyarakatnya dan menekankan bahwa manusia harus saling mencintai, sebagaimana Tuhan mencintai umat manusia.³⁷

Pengaruh Syekh Arsyad dan latar belakang keagamaan Hatta yang cukup kuat membuatnya sadar untuk menjadikan Islam sebagai jiwa partainya. Barangkali tepat yang dikatakan Natsir bahwa Hatta tidak menggunakan gagasan-gagasan keislaman sebagai pengertian bangsa dan negara seperti yang dilakukan Masyumi. Ini setidaknya menunjukkan bahwa pengaruh Syekh Arsyad yang tidak mendukung konsep “negara Islam”. Dalam hal ini Syekh Arsyad menunjukkan Khilafah Usmani sebagai telah memperburuk citra Islam. Pamannya mengatakan bahwa Turki Usmani menjadi besar karena spirit Islamnya. Akan tetapi para Sultan hanya mementingkan kekuasaannya belaka. Mereka menjadi tiran dan tidak mematuhi Allah. Kelemahan Usmani disebabkan oleh

mengusung penyatuan Islam dalam Negara. Lihat Bahtiar Effendy, *Islam and the State in Indonesia*, (Singapore: ISEAS, 2003), h. 30. Lihat pula Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan di Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 107-108.

³⁶ Lihat pengantar Mohammad Roem dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Jati Press, 2004), h. 10.

³⁷ Hatta, *Memorandum*, h. 10.

perilaku Sultan sendiri. Pamannya menyimpulkan bahwa Islam mengalami kelemahan karena penguasa-penguasanya menjadi haus kekuasaan, memusatkan kekuasaan dan berperilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.³⁸

Hatta memang tidak meyakini konsep “negara Islam”, sebagaimana dalam pandangannya sebagai anggota Panitia Sembilan dalam PPKI tahun 1945 tentang dasar negara. Hal ini ditegaskannya kembali ketika ia merencanakan pendirian PDII. Menurutnya, suatu “negara Islam” hanya akan merobek persatuan dan kesatuan Indonesia. Tetapi, gerakan atau partai Islamnya akan membawa risalah untuk toleransi, persaudaraan, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, sehingga hal ini akan memberi sumbangan dalam pembinaan persatuan dan kesatuan serta kerja sama antara berbagai penganut agama.³⁹

Selain itu, kekecewaan Hatta terhadap iklim politik era Soekarno juga merupakan faktor penting dalam pembentukan partai Islamnya. Di satu sisi Hatta melihat partai Islam sibuk mempertahankan gagasan negara Islam, sementara di sisi lain mereka belum siap dengan konsep-konsep yang dapat diterima dalam bidang sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan umat. Hatta melihat permasalahan ini lebih tajam lagi. Romantika gagasan mendirikan negara Islam bagi Hatta hanya sebuah utopia. Yang paling utama, menurutnya, adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyadarkan mereka akan hak-hak mereka dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 5 Anggaran Dasar PDII dijelaskan secara konkret politik yang akan dijalankan PDII dalam bidang kenegaraan, ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, keuangan, politik luar negeri dan pertahanan nasional. Dari uraian masing-masing bidang terlihat keberpihakan PDII terhadap kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya golongan umat Islam.⁴⁰ Rumusan-rumusan ini sangat antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Sebagai orang yang selama ini tidak pernah

berbicara atas nama Islam, Hatta sadar betul usahanya dapat digunakan oleh kelompok tertentu untuk mengambil keuntungan. Dengan kata lain, sangat mungkin terjadi bahwa Hatta diperalat oleh kelompok Islam. Namun, sebagai orang pergerakan yang cukup matang dalam pengalaman politik, Hatta tidak mudah terbawa dan terseret oleh pengaruh tersebut. Lagi pula, Hatta lebih banyak menampilkan sosok dan sikap sebagai orang tua yang memberi contoh dalam partai Islamnya. Hatta juga lebih tertarik mengajak kalangan anak muda yang relatif tidak terpengaruh pada politik masa lalu dan masih memiliki semangat idealisme yang tinggi.

Prinsip keberagamaan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil serta cita-cita perjuangannya dalam menegakkan sosialisme dan demokrasi merupakan tiga hal yang tidak dapat ditawar-tawar dalam diri Hatta. Hal ini tercermin dalam ketegasan sikap sikap Hatta menolak kepemimpinan Soekarno yang berlawanan secara prinsip dengan pendirian Hatta. Dalam jawabannya terhadap kekhawatiran teman lamanya, von Konijnberg, Hatta menyatakan bahwa ia mempunyai keyakinan yang tetap dan tegas dalam soal agama dan sosial ekonomi kemasyarakatan, sehingga orang tidak akan mudah menyeretnya menyimpang dari pendirian yang dianutnya.⁴¹ Karena itu, Hatta selalu menekankan nilai-nilai moralitas dan etika dalam setiap gerakannya.

Mochtar Naim, dalam sebuah makalahnya menyatakan bahwa kalau kita telusuri dari keseluruhan pemahaman pemikiran dan pengalaman intelektual Hatta, secara sosiologis dapat dikatakan bahwa sosok Hatta memperlihatkan pertemuan unsur-unsur budaya yang serasi dan saling mengisi serta saling melengkapi. Unsur itu adalah adat budaya Minangkabau, syara` (Islam) dan dunia pemikiran modern Barat. Menurut Naim, ketiga hal tersebut sebenarnya dimiliki oleh rata-rata intelektual asal Minang pada masanya, namun pada diri Hatta hal ini terlihat sangat kental.⁴²

³⁸ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 646.

³⁹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 646.

⁴⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 646.

⁴¹ Mochtar Naim, “Mohammad Hatta dan Konsep Pembangunan Ekonomi-Politik Koperasi di Indonesia”, *Makalah* tidak dipublikasikan, disampaikan pada Seminar Nasional In Memoriam Mohammad Hatta yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Hattatama, 6 Maret 1998.

³⁸ Hatta, *Memoirs Indonesian Patriot*, h. 23-24.

³⁹ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 646.

⁴⁰ Deliar Noer, *Mohammad Hatta...*, h. 646.

Dari sudut alam Minangkabau, pada diri Hatta berhimpun darah seorang ulama dan saudagar. Kakek Hatta dari ayahnya, Syekh Abdurrahman, adalah seorang ulama pemimpin tarekat Naqsyabandiyah. Sementara pamannya, Syekh Arsjad, juga merupakan ulama yang sangat berpengaruh di Batuhampar. Dalam pengakuan Hatta sendiri, pamannya ini sangat mencintainya. Ekspresi wajahnya selalu ramah, merefleksikan jiwa yang bersih. Kata-katanya selalu berisi pesan moral. Air muka dan karakternya sesuai dengan kedudukannya sebagai ulama dan penganut tarekat. Hatta mengakui sangat mengagumi pamannya ini. Darinya Hatta belajar banyak tentang kehidupan. Pamannya ini sangat pandai memperkenalkan ajaran-ajaran Islam kepada Hatta dengan simpel. Ajaran yang sangat diingat oleh Hatta dari pamannya adalah bahwa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan adalah Allah, Pencipta alam. Allah memberi kita kehidupan. Karenanya, kita wajib bersyukur pada-Nya dan mencintai satu sama lain dan saling berbagi dengan orang lain.⁴³

Di sisi lain, alam Minangkabau yang terkenal terbuka, egaliter dan terbiasa bekerja sama dalam perdagangan, agaknya memberi nuansa tersendiri bagi Hatta dalam mengembangkan gagasan-gagasannya dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Dari keterbukaan dan watak egalitarianisme tersebut Hatta tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang terbuka, menghargai perbedaan pendapat, egaliter dan, ini yang tidak kalah penting, sangat mengecam segala bentuk penyimpangan dari sifat-sifat demikian. Agama dan ekonomi menanam dalam jiwanya dan otaknya keyakinan sosialisme religius. Menurutnya, Islam menuntut pelaksanaan sosialisme di dunia. Dalam sebuah kesempatan Hatta menerangkan bahwa bagi kita orang Islam yang taat kepada perintah Allah, sosialisme itu harus timbul dari kemauan kita sebagai perintah agama.⁴⁴

Perpaduan antara darah ulama dan jiwa pedagang yang sangat kental serta pengaruh lingkungan alam Minangkabau dalam diri Hatta diperkaya pula dengan pengenalannya terhadap

nilai-nilai demokrasi dan sosialisme yang ia pelajari di Barat. Hatta sendiri mengungkapkan tentang hubungan sosialisme dan Islam sebagai dua hal yang tidak bertentangan. Bagi Hatta, salah satu faktor yang ikut memengaruhi paham sosialisme di Indonesia adalah ajaran Islam itu sendiri.⁴⁵ Dalam kesempatan lain Hatta menegaskan tiga sumber demokrasi sosial yang ingin dikembangkannya, yaitu: paham sosialis Barat yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya; ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan dan kolektivisme yang menjadi watak dasar masyarakat Indonesia.⁴⁶ Dengan demikian, unsur-unsur ini menjadi sebuah kombinasi yang apik yang hidup dan mekar dalam diri Hatta.

Dari sinilah kita dapat melihat usaha Hatta mendirikan PDII. Usaha ini memperlihatkan bagaimana Hatta sebagai seorang yang aktivis pergerakan, intelektual dan Bapak Bangsa mencoba memberi sumbangan bagi bangsa yang ia perjuangkan dan proklamasikan bersama Soekarno. Hatta ingin memberikan pengajaran berdemokrasi bagi bangsanya, terutama bagi kalangan anak muda yang masih memiliki semangat dan idealisme yang tinggi. Kalau ternyata usaha Hatta ini tidak mendapat izin, alasan yang paling penting sebenarnya bukanlah karena pemerintah tidak ingin partai-partai Islam berjalan tanpa kontrol dari atas, melainkan implikasi dari partainya sendiri. Jika PDII diizinkan berdiri, berarti pemerintah akan berhadapan dengan kebesaran Hatta sebagai negawaran dan simpati rakyat yang begitu besar kepadanya.

Meskipun Hatta tidak berbicara mengenai negara Islam, konsep partainya yang jelas sangat merakyat, dengan mudah akan merebut hati masyarakat luas. Nama besar Hatta sebagai tokoh Proklamator yang tidak punya "cacat politik" juga memainkan peranan yang sangat signifikan. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh rezim Orde Baru yang dengan slogannya pembangunan sebagai ideologi berusaha memperbaiki perekonomian

⁴³ Hatta, *Memoirs Indonesian Patriot*, h. 14-15.

⁴⁴ Lihat Hatta, *Kumpulan Karangan I*, (Jakarta: Bulan

⁴⁵ Lihat Hatta, *Kumpulan Pidato II*, (Jakarta: Idayu, 1983), h. 106-116.

⁴⁶ Hatta, *Demokrasi dan Keadilan*, h. 106-116.

rakyat yang telah rusak pada masa Orde Lama. Karena itu, pemerintah Orde Baru—dengan militer sebagai basis kekuatannya—harus bersikap sebagai penguasa tunggal. Mengizinkan berdirinya PDII sama artinya dengan mengurangi kekuasaan mereka, suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh rezim Soeharto.

Agaknya pemerintah tidak melihat PDII dari sudut Islamnya, tetapi dari sudut sosialisme-Islam dan demokrasi yang dicita-citakannya. Sosialisme Islam yang dipadukan dengan praktik Leninisme membentuk perpaduan yang berbahaya dan terlalu berbahaya sebagai oposisi.⁴⁷ Memang, pada tahun 1970-an Hatta mengusulkan adanya partai oposisi untuk mengontrol pelaksanaan demokrasi. Implikasi nuansa dan metodologi demokrasi sosial partai ini yang mungkin dapat menggoyahkan kekuasaan Orde Baru. Karenanya, adalah lebih aman bagi Orde Baru untuk memarginalkan Hatta dalam kancah politik Indonesia.

Penutup

Melihat aktivitas politik, gagasan dan pemikirannya, dengan meminjam tipologi yang diungkapkan Munawir Sjadzali, dapat dikatakan bahwa Hatta adalah seorang yang tidak menginginkan Islam integral dengan sistem kenegaraan dan mengatur secara formal segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan seperti yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir integralistik. Namun, ia juga tidak menghendaki bahwa Islam membiarkan umatnya mengatur masalah-masalah politik ketatanegaraan tanpa kendali agama dan moralitas, sebagaimana dikembangkan oleh kelompok sekularis. Hatta agaknya adalah seorang yang berpikir simbiotik. Ia berdiri di antara kedua kutub pemikiran di atas dan menginginkan Islam memberi nilai-nilai yang harus dikembangkan dan dijabarkan dalam setiap permasalahan ketatanegaraan.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Hatta sendiri bahwa umat Islam jangan seperti gincu yang terlihat mewarnai tetapi tidak memberi rasa. Sebaliknya umat Islam harus seperti filsafat garam yang meskipun tidak kelihatan

tetapi mampu memberi rasa tersendiri.⁴⁹ Artinya, umat Islam jangan terpaku pada mayoritas dan formalitas simbolis, tetapi bagaimana mampu mengamalkan dan menjabarkan ajaran-ajaran Islam yang *rahmatan lil 'âlamîn* demi kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan bangsa dan negara.

Agaknya tepat apa yang disimpulkan Noer, “... sungguhpun ia menjadi pemrakarsa penggantian tujuh kata-kata dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya) dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, ia senantiasa memahami sila ini dengan pengertian *tauhid*.⁵⁰

Walaupun kecewa, Hatta menerima keputusan penolakan berdirinya PDII dengan besar hati. Hatta tidak melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional untuk melawan keputusan pemerintah Orde Baru. Namun, yang perlu dicatat dari usahanya ini adalah bahwa gagasannya mendirikan PDII bukanlah merupakan pergeseran pemikiran. Usaha ini merupakan kristalisasi dari sikap dan keyakinan keagamaan yang dianut Hatta selama ini secara konsisten. Kurang tepat kalau dikatakan bahwa Hatta telah berubah dari yang sebelumnya. Gagasan dan pemikiran Hatta tetap lurus dan konsisten pada tiga hal; yakni keislaman, sosialisme dan demokrasi. Ini semua terangkum dalam setiap pikiran, tindakan dan sikap Hatta. Dengan demikian, pemetaan terhadap Hatta sebagai seorang nasionalis sekuler tentunya harus dipertanyakan kembali. Hatta tidak menjadikan Islam harus mengisi kehidupan politik secara formal, tetapi menginginkan nilai-nilainya masuk dan merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pustaka Acuan

- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1949*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Press, 1985.
- Djunaidi, Mahbub, et al., *PPP, NU dan MI Gejolak*

⁴⁷ Mavis Rose, *Biografi Politik...*, h. 363.

⁴⁸ Lihat buku Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*,

⁴⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, h. 121.

- Wadah Politik Islam, Jakarta: Integrita Press, 1984.
- Effendy, Bahtiar, *Islam and the State in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hatta, Mohammad, *Memoirs Indonesian Patriot*, Singapore: Gunung Agung, 1981.
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Pidato*, Jilid III, Jakarta: Yayasan Idayu Press, 1985.
- Hatta, Mohammad, *Demokrasi Kita, Bebas Aktif, Ekonomi Masa Depan*, Jakarta: UI Press, 1997.
- Iqbal, Muhammad, *Fira'un Abad 21 Refleksi atas Persoalan-persoalan Keislaman dan Keindonesiaan*, Bandung: Citapustaka Media, 2006.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Percaturan di Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Naim, Mochtar, "Mohammad Hatta dan Konsep Pembangunan Ekonomi-Politik Koperasi di Indonesia", makalah disampaikan pada Seminar Nasional In Memoriam Mohammad Hatta yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Hatta, Jakarta, 16 Maret 1995, h. 1.
- Noer, Deliar, *Mohammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Noer, Deliar, *Aku Bagian Ummat Aku Bagian Bangsa*, Bandung: Mizan, 1999.
- Noer, Deliar, *Membicarakan Tokoh-tokoh Bangsa*, Bandung: Mizan, 2001.
- Rose, Mavis, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Saidi, Ridwan, "Dinamika Kepemimpinan Islam dalam Era Orde Baru", dalam M., Amien Rais, *Islam di Indonesia Suatu Ikhtiar Mengaca Diri*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Sastrosatomo, Soebadio "Pemikiran Politik dan Perjuangan Bung Hatta dan Sosok Negarawan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional In Memoriam Mohamamd Hatta yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Yayasan Bung Hatta, Jakarta, 16 Maret 1995.
- Widjaja, I. Wangsa, *Mengenang Bung Hatta*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

